

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penerapan sistem pencatatan dan metode penilaian persediaan barang dagang pada CV Yuwono Mitra Mandiri Palembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan persediaan barang dagang pada CV Yuwono Mitra Mandiri Palembang masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh IAI. Pembelian dan penjualan persediaan barang dagang sudah dicatat oleh perusahaan dengan menggunakan kartu dalam bentuk sederhana untuk setiap barang, tetapi kartu tersebut hanya berisi jumlah unit dari pembelian dan penjualan serta harga beli persediaan saja. Hal ini tidak sesuai dengan yang dinyatakan pada SAK ETAP oleh IAI, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam mencatat dan menghitung nilai persediaan barang dagang serta menunjukkan nilai yang tidak sebenarnya pada laporan keuangan.
2. Penilaian persediaan barang dagang pada CV Yuwono Mitra Mandiri Palembang masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh IAI. Dalam menghitung nilai persediaan akhir, perusahaan hanya menghitung dengan cara mengalikan harga pembelian yang paling akhir dengan jumlah unit persediaan yang tersisa di gudang pada akhir periode akuntansi tertentu. Tidak sesuainya metode dalam menghitung nilai persediaan akhir dapat berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Nilai Beban Pokok Penjualan (BPP) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan nilai persediaan akhir pada laporan posisi keuangan tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.

## 5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil, penulis dapat memberikan saran-saran kepada CV Yuwono Mitra Mandiri Palembang yang diharapkan dapat berguna dan menjadi pertimbangan perusahaan untuk memperbaiki sistem pencatatan dan metode penilaian persediaan barang dagang dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh IAI. Berikut saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pencatatan persediaan barang dagang, perusahaan sebaiknya menggunakan sistem perpetual. Dengan sistem perpetual, perusahaan dapat mengetahui jumlah unit persediaan barang dagang yang dimiliki dan nilai persediaan akhir setiap saat tanpa harus melakukan perhitungan fisik ke gudang. Sistem perpetual juga akan memudahkan bagian pembukuan dalam penyusunan laporan keuangan jangka pendek, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan fisik untuk mengetahui nilai persediaan akhir.
2. Dalam melakukan penilaian persediaan barang dagang, perusahaan sebaiknya menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Hasil analisis yang telah dilakukan mengenai penilaian persediaan barang dagang menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) menunjukkan nilai persediaan akhir lebih besar sesuai dengan hasil perhitungan pada tabel 4.1, 4.3 dan tabel 4.5, dibandingkan dengan menggunakan metode Rata-rata Tertimbang yaitu pada tabel 4.2, 4.4. dan tabel 4.6. Nilai persediaan akhir yang besar menghasilkan Beban Pokok Penjualan (BPP) yang rendah sehingga laba kotor yang dapat diperoleh perusahaan menjadi besar sesuai dengan perhitungan hasil laba kotor pada tabel 4.8, 4.9, dan 4.10. Dengan menggunakan metode penilaian persediaan barang dagang yang sesuai dengan SAK ETAP, maka Beban Pokok Penjualan (BPP) dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan nilai persediaan akhir dalam laporan posisi keuangan menunjukkan nilai yang sebenarnya.